



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI
LAPAS KELAS I SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk diuji guna melengkapi tugas-tugas
Dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

MAHENDRA SATRIO WIBOWO
NPM : 221003742019194

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

2026



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS
DI LAPAS KELAS I SEMARANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

MAHENDRA SATRIO WIBOWO

NPM : 221003742019194

Mengesahkan,

Tim Penguji

Dosen Pembimbing/Penguji I

Sri Setiawati, S.H., M.H.

NUPTK: 2453741642230072

Dosen Penguji II

Mig Irfanto Legowo, S.H., MSi.

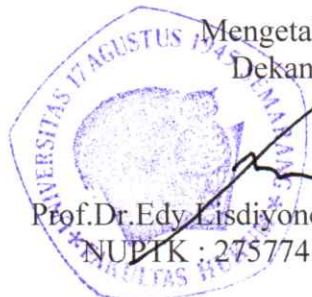
NUPTK: 1442740641130092

Dosen Penguji III

Bambang Purwanto, S.H., M.H.

NUPTK: 5636742643130092

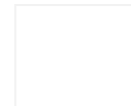
Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdjono, S.H., M.Hum.

NUPTK : 2757741642130072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2026**



ABSTRAK

Perlindungan hak narapidana penyandang disabilitas tidak berhenti sebagai norma “ideal” dalam peraturan perundang-undangan, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik layanan pemasyarakatan sehari-hari. Dalam konteks lapas yang cenderung menghadapi beban penghuni tinggi dan keterbatasan sumber daya, kelompok penyandang disabilitas memiliki kerentanan berlapis: mereka berisiko mengalami hambatan akses terhadap layanan kesehatan, pembinaan, informasi, serta prosedur administratif dan pengaduan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Semarang, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang didapatkan adalah (1) Pengaturan hukum perlindungan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Semarang pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang memadai melalui instrumen hukum nasional.

(2) Implementasi perlindungan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Semarang telah mulai diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan alat bantu yang mendukung aksesibilitas, seperti kursi roda, walker/alat bantu jalan, tongkat, ram/akses jalan, pegangan (handrail), serta toilet dengan penanda aksesibilitas dan komponen pendukung. Upaya ini menunjukkan adanya ikhtiar institusional untuk mengikuti arah pedoman ULD dan memastikan akses layanan pemasyarakatan bagi warga binaan penyandang disabilitas.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Disabilitas.*

ABSTRACT

The protection of the rights of prisoners with disabilities does not stop as an “ideal” norm in legislation; rather, it must be genuinely realized in everyday correctional services. In the context of correctional institutions that tend to face high occupancy and limited resources, persons with disabilities have layered vulnerabilities: they are at risk of encountering barriers in accessing health services, rehabilitation and development programs, information, as well as administrative and complaint procedures. The methodological approach used in this study is a sociological-juridical approach.

This study aims to describe and analyze the implementation of the protection of the rights of prisoners with disabilities at the Class I Correctional Institution in Semarang, and to assess its conformity with the applicable legal provisions. The findings of this study are: (1) The legal regulation on the protection of the rights of prisoners with disabilities at the Class I Correctional Institution in Semarang, in principle, already has an adequate normative basis through national legal instruments.

(2) The implementation of the protection of the rights of prisoners with disabilities at the Class I Correctional Institution in Semarang has begun to be realized through the provision of facilities and assistive devices that support accessibility, such as wheelchairs, walkers/mobility aids, canes, ramps/access routes, handrails, as well as toilets with accessibility signage and supporting components. These efforts indicate an institutional commitment to follow the direction of the ULD guidelines and to ensure access to correctional services for inmates with disabilities.

Keywords: *Legal Protection, Prisoners' Rights, Correctional Institution, Disability.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	12
B. Pengertian Disabilitas.....	31
C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	35

D. Hak-Hak Narapidana.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Metode Pendekatan	42
B. Spesifikasi Penelitian	43
C. Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Lokasi Penelitian.....	47
E. Metode Analisis Data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	50
A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lapas Kelas I Semarang.....	50
B. Implementasi Perlindungan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lapas Kelas I Semarang.....	78
C. Hambatan Serta Solusi Dalam Pemenuhan Perlindungan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lapas Kelas I Semarang...	82
BAB V : PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91